

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Menghilangkan Atau Melestarikan Kearifan Lokal Bali

Anak Agung Ayu Intan Parameswari
Department of International Relations, Udayana University Bali, Indonesia

ABSTRACT

This study was conducted to see whether the Indonesian government's policy to increase tourist visits will eliminate the values of local wisdom and reduce people's welfare or vice versa. Furthermore, this paper also examines whether there is a role that the government can take to improve the welfare of the Balinese people and protect local values as the unique attraction of Bali as the Island of the Gods. The findings of this research found that the high competition between countries in order to attract tourist visits to their country has caused Indonesia to start thinking and seriously reviewing various ways to further increase the number of tourists visiting Indonesia. Bali, as a tourist destination, is strongly encouraged to be able to increase the number of tourist visits every year. However, the question is whether the government is capable enough to encourage the growth of this sector without ignoring many conflicting effects that can arise, one of which is the increasing number of tourists in quantity but not accompanied by the quality of tourists and their purchasing power in this country. Another thing in terms of language problems, for example, tourists visiting Bali are mostly from China. Related to this, our society needs to work hard to be able to adapt and have good Chinese language skills in order to treat Chinese tourists. However, in practice many tour guides come from outside Bali, causing concerns and feelings of competition for the local Balinese people who work in this field.

Keywords : *tourism, local wisdom, visa free policy, Bali*

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkajian mengenai apakah kebijakan ini akan menghilangkan atau mampu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada hingga kesejahteraan masyarakat lokal serta apakah ada peran yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat lokal serta nilai-nilai agar tentu dapat tetap dilestarikan sebagai satu daya Tarik khas Pulau Dewata. Temuan dalam penelitian ini ada;ah bahwa tingginya persaingan antar negara yang menyebabkan Indonesia mulai memikirkan bagaimana untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia terus dikaji. Bali khususnya sebagai daerah pariwisata menjadi daerah yang begitu didorong untuk mampu setiap tahunnya terus meningkatkan jumlah wisatawannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mampu mendorong perekonomian di sektor ini tanpa melihat banyak efek yang dapat muncul, salah satunya adalah jumlah wisatawan yang meningkat secara kuantitas tidak diiringi dengan kualitas wisatawan yang datang serta daya beli mereka di negara ini. Hal lainnya ialah wisatawan yang banyak datang ialah wisatawan asal negara Tiongkok yang mana dari sisi Bahasa masyarakat kita perlu berupaya keras untuk beradaptasi dalam sisi Bahasa untuk dapat mentreat wisatawan yang datang yang pada prakteknya banyak tour guide yang berasal dari luar bali yang perlu didatangkan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lokal bali yang merasa tersaingi.

Kata kunci: *turisme, kearifan lokal, kebijakan bebas visa, Bali*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Luar Negeri pada sektor pariwisata belakangan banyak diperbincangan, kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan pemerintah pusat terhadap 169 negara yang berkunjung ke Indonesia memang menjadi hal yang tentu diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, dimana kebijakan ini tentu bertujuan meningkatkan sektor ekonomi dengan masuknya devisa ke negara ini. Jumlah devisa yang

dihasilkan melalui sektor pariwisata memang bukan main-main dipikirkan pemerintah sebagai satu solusi untuk meningkatkan perekonomian kita di era globalisasi saat ini yang mana persaingan masing-masing negara untuk mengajak wisatawan berkunjung ke negaranya berhasil dilakukan oleh beberapa negara. Sebut saja Korea yang setiap tahunnya mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan adanya paket-paket tour yang ditawarkan, selain objek wisata dan budayanya terdapat pula *girl band* dan *boyband* korea yang diminati banyak kalangan anak muda hingga wisata kecantikan yang banyak diminati kaum wanita. Tingginya persaingan antar negara yang menyebabkan Indonesia mulai memikirkan bagaimana untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia terus dikaji.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini diterapkan kepada 169 negara yang tentu akan dirasakan oleh daerah-daerah pariwisata, dan tentu ekonomi menjadi hal utama yang diharapkan berkembang pesat dan dapat dirasakan oleh masyarakat local setempat. Bali khususnya sebagai daerah pariwisata menjadi daerah yang begitu didorong untuk mampu setiap tahunnya terus meningkatkan jumlah wisatawannya. Tahun 2019 merupakan tahun dimana target kunjungan wisatawan ke Indonesia dapat mencapai angka 20 juta orang dan Bali ditargetkan mencapai angka 8 juta, sungguh angka yang luar biasa mengingat ditahun sebelumnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali baru mencapai 5 jutaan kunjungan ke Bali. Memang tidak mudah ketika tahun 2017 bisa dikatakan ketika itu target tercapai, namun di tahun 2018 target cenderung sulit dicapai dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ialah bencana alam dan bagaimana negara-negara kompetitor menghatam kita dengan berbagai berita hoax, sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mampu mendorong perekonomian di sektor ini tanpa melihat banyak efek yang dapat muncul, salah satunya adalah jumlah wisatawan yang meningkat secara kuantitas tidak diiringi dengan kualitas wisatawan yang datang serta daya beli mereka di negara ini sehingga dapat dikatakan tidak secara langsung menyentuh perekonomian masyarakat lokal. Hal lainnya ialah wisatawan yang banyak datang ialah wisatawan asal negara Tiongkok yang mana dari sisi Bahasa masyarakat kita perlu berupaya keras untuk beradaptasi dalam sisi Bahasa untuk dapat men-*treat* wisatawan yang datang yang pada prakteknya banyak *tour guide* yang berasal dari luar bali yang perlu didatangkan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lokal bali yang merasa tersaingi. Sehingga dari penelitian ini akan peneliti lakukan kajian mengenai apakah kebijakan ini akan menghilangkan atau mampu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada hingga kesejahteraan masyarakat lokal dapat terjaga serta apakah ada peran yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat local serta nilai-nilai agar tentu sistem sosial yang berada di Bali ini dapat ajeg dapat tetap dilestarikan sebagai satu daya Tarik khas Pulau Dewata. Bagaimanakah efektivitas kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan berdampak terhadap pariwisata dan kearifan lokal daerah khususnya Bali?

2. KERANGKA ANALISA

Pembangunan pariwisata di berbagai negara didunia benar-benar memberikan keuntungan secara ekonomi. Peluang-peluang kegiatan ekonomi di sektor pariwisata hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat, termasuk Indonesia. Di sisi lain, kemungkinan dampak pembangunan pariwisata di bidang ekonomi yang bersifat merugikan perlu dipahami lebih dini agar dapat diantisipasi akan akibatnya. Pembangunan pariwisata ternyata pula dapat membawa masyarakat menjadi kreatif dan terangsang dengan pengalaman-pengalaman baru serta pentingnya keindahan lingkungan. Namun di sisi lain, pariwisata sering pula dikritik sebagai pendukung terhadap pencemaran imoralitas, perusak kata, dan problem-problem sosial yang berkaitan dengannya (Sessoms1984:116). Dari segi sosial-budaya, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata terhadap masyarakat dan budaya setempat lebih banyak buruknya daripada baiknya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kemungkinan-

kemungkinan dampak yang bersifat merusak tersebut perlu mendapatkan perhatian agar dapat terhindar dari ancaman rusaknya kepribadian bangsa dan hancurnya nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang senantiasa dipelihara dan diaktualisasikan dari waktu ke waktu.

Adapun dampak positif yang dapat dirasakan dalam Pembangunan Pariwisata dapat dirasakan tentu pada sektor ekonomi, namun pada sektor sosial budaya tentu tidak dapat dipungkiri hal ini dapat berdampak yaitu pada sisi perubahan struktur demografi, perubahan jenis pekerjaan, perubahan nilai-nilai, pemeliharaan cara-cara hidup tradisional, dan beberapa perubahan lainnya yaitu penurunan nilai-nilai artistik dan perubahan pola konsumsi harian. Perubahan nilai-nilai yang dipelihara dan berkembang pada masyarakat setempat dapat mengalami perubahan karena masuknya nilai-nilai yang dibawa oleh wisatawan sebagai kelompok yang berbeda. Gejala ini, biasa disebut "*demonstration effect*". Di berbagai wilayah ternyata menunjukkan bahwa tingkah laku wisatawan dapat merusak norma-norma masyarakat setempat. Dalam beberapa kejadian ternyata pula bahwa wisatawan justru lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat. Hal ini terjadi apabila wisatawan dalam wisatanya bertujuan untuk mencari penguatan atau peningkatan dalam hal politik, ideologi, atau keyakinan/keagamaan melalui kunjungan ke tempat-tempat tertentu, seperti Israel, India, Mekah, dan Lourdes (Pearce, 1983:52). Kemudian dampak lainnya disebut Pemeliharaan Cara-cara Hidup Tradisional, dimana Pembangunan pariwisata dapat meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan cara-cara hidup tradisional di negara-negara sedang berkembang. Alasannya ialah 'bahwa kesenian-kesenian yang ada sampai sekarang masih menjadi bagian yang sangat penting dari permintaan wisatawan Eropa. Masyarakat menjadi tergugah kembali untuk memperhatikan seni budayanya (PcCirce, 1983:53).

Adapun tulisan lainnya yang coba dilihat peneliti untuk melihat bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berdampak pada masyarakat lokal dan apa strateginya. Strategi Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Menurut Yoeti (1996, h. 170), wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut: 1. Fasilitas transportasi 2. Fasilitas akomodasi, 3. Fasilitas Catering, 4. Obyek dan atraksi wisata 5. Aktivitas rekreasi 6. Fasilitas pembelanjaan 7. Tempat atau *took*, semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu: 1) Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah: Hotel, Villa, Restoran. 2) Sarana Pelengkap Pariwisata (*Suplementing Tourism Superstructures*) adalah: wisata budaya dan wisata alam. 3) Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah. Kemudian Pengembangan Pariwisata Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi, (2) memelihara kepribadian bangsa & kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Sedangkan Jamieson dan Noble (2000) menuliskan beberapa prinsip penting dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu: (1) Pariwisata tersebut mempunyai prakarsa untuk membantu masyarakat agar dapat mempertahankan kontrol/ pengawasan terhadap perkembangan 10 pariwisata tersebut; (2) Pariwisata ini mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas kepada dan dari masyarakat setempat dan terdapat pertalian yang erat (yang harus dijaga) antara usaha lokal dan pariwisata; (3) Terdapat peraturan tentang

perilaku yang disusun untuk wisatawan pada semua tingkatan (nasional, regional dan setempat) yang didasarkan pada standar kesepakatan internasional. Pedoman tentang operasi pariwisata, taksiran penilaian dampak pariwisata, pengawasan dari dampak kumulatif pariwisata, dan ambang batas perubahan yang dapat diterima merupakan contoh peraturan yang harus disusun; (4) Terdapat program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menjaga warisan budaya dan sumber daya alam yang ada.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pariwisata yang bersifat multisektoral merupakan fenomena yang sangat kompleks dan sulit didefinisikan secara baku untuk diterima secara universal. Sehingga menimbulkan berbagai persepsi pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai industri, sebagai aktivitas, atau sebagai sistem. Pariwisata yang melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, *supply dan demand*, politik, sosial budaya yang saling berinteraksi dengan eratnya, akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dalam kerangka kesisteman tersebut, pendekatan terhadap fungsi dan peran pelaku, dampak lingkungan, peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, serta kesetaraan dalam proses penyelenggaraan menjadi semakin penting. Kecenderungan yang berkembang dalam sektor kepariwisataan maupun pembangunan melahirkan konsep pariwisata yang tepat dan secara aktif membantu menjaga keberlangsungan pemanfaatan budaya dan alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan apa yang disebut sebagai pilar dari pariwisata berkelanjutan yaitu ekonomi masyarakat, lingkungan dan sosial budaya.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, dapat dikatakan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Untuk itu maka perlu diperhatikan bahwa faktor yang menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif secara seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan konteks pembangunan berkelanjutan di atas, pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai: pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan memberi peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan dan mengembangkannya. Ketiga pilar pariwisata berkelanjutan tersebut harus dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip operasionalisasi yang disepakati oleh para pelaku (*stakeholder*) dari berbagai sektor (*multisector*). Dengan harapan, kesepakatan dan kesamaan pandang tersebut dapat mewujudkan orientasi pengembangan pembangunan kepariwisataan yang juga sama dan terpadu. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang dimaksud adalah "Berbasis Masyarakat". Tentu saja prinsip-prinsip tersebut paling kental pada agrowisata, selain secara geografis berada di pedesaan juga secara sistem, langsung menyentuh lapisan masyarakat pada level paling bawah (petani kecil) baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung, terhadap seluruh kegiatan pembangunan pariwisata dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Masyarakat diletakkan sebagai faktor utama, yang memiliki kepentingan berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dengan dilandaskan pada opsi pemilikan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerja sama dengan swasta.

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pembangunan berkelanjutan yang akan digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Sama halnya dengan kegiatan ESD yang dilaksanakan di Desa Bongkasa Pertiwi, Badung Bali meliputi kegiatan pendidikan untuk pengembangan program berkelanjutan sebagai media yang efektif dan edukatif yaitu dengan mengembangkan pola pikir yang berimbang dengan mencakup *triple bottom line* yakni saling keterkaitan antar sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itulah mengapa *ecological tourism* dipilih dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Bongkasa Pertiwi ini, tiap-tiap program kegiatan yang dirancang akan menggunakan metode dan teknologi yang bisa memberikan kesadaran serta kemampuan terutama generasi mendatang dalam berkontribusi dalam keberlanjutan kebijakan pariwisata ini.

Kelompok sasaran dalam kegiatan ini dapat dibagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kelompok sasaran dalam pembuatan desain pengembangan produksi pariwisata adalah para pelaku wisata, khususnya masyarakat lokal. Kedua, kelompok sasaran dalam pembuatan desain 12 pengembangan manajemen dan pemasaran pariwisata adalah tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem hubungan kelembagaan pariwisata dengan mendayagunakan lembaga-lembaga lokal yang telah ada. Disamping itu terdapat kegiatan tentang sistem promosi dan pengembangan jaringan pemasaran pariwisata. Dan ketiga, kelompok sasaran dalam pembuatan desain pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata adalah kelompok pengrajin dan masyarakat desa. ESD diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran dalam meningkatkan kemampuan SDM bidang pariwisata, berupa: program pembimbingan dan pelatihan dalam bidang kerajinan, pengelolaan pusat informasi wisata, pemandu wisata, dan manajemen kelembagaan. Metode yang digunakan dalam Pengembangan SDM bidang Pariwisata adalah pembimbingan, pendampingan, dan instruksional partisipatif. Dengan adanya tulisan-tulisan pendukung tersebut diatas penelitian ini diharapkan juga akan mengkaji peranan Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan hingga teraplikasi oleh pemerintah daerah, khususnya Bali, untuk dapat melihat bagaimana dampak kebijakan pada masyarakat lokal apakah berdampak positif atau negatif dan apa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keuntungan yang maksimal dalam sektor pariwisata dan ekonomi dengan membawa keuntungan lain di sektor sosial dan budaya.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian diperlukan guna mengarahkan dan menuntun pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai sama dengan realitas. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis dan sifat penelitian yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang tepat pula. Ada beberapa metode yang sering dipergunakan dalam Ilmu Hubungan Internasional antara lain metode kualitatif, metode kuantitatif, serta metode komparatif. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, akan dianalisa mengenai analisa kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diterapkan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan membenahi sektor pariwisata untuk tujuan peningkatan *income* devisa apakah akan merusak atau melestarikan kearifan lokal yang ada di Bali dengan melihat berbagai aspek yang dapat menjadi akibat dan keuntungan yang diterima dari diterapkannya kebijakan tersebut. Maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitis untuk menjabarkan strategi pengembangan wisata lokal setempat. Data untuk penelitian ini dicari melalui sumber-sumber tertulis maupun lisan. Sumber tertulis yang digunakan berasal dari dokumen, majalah, surat kabar, dan jurnal, sedangkan sumber lisan didapatkan dari hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh wilayah setempat. Lokasi penelitian Penelitian ini akan mengambil lokasi di Provinsi Bali. Objek pengamatan yang menjadi fokus kajian dalam riset ini adalah

Efektivitas kebijakan luar negeri yang akan berimbas pada sektor ekonomi dan pariwisata di daerah khususnya Bali.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif, pengumpulan data untuk maka riset studi kasus ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu : wawancara mendalam (*depth interview*), dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu seputar 14 kegiatan di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yang dianggap mengerti dan memahami berbagai isu dan masalah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian ini, baik dari kalangan tokoh masyarakat, perwakilan lembaga setempat, serta warga yang terlibat langsung pada sektor pariwisata.

Data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kategori atau tema-tema tertentu setelah dilakukan reduksi padanya. Hasil reduksi tersebut kemudian *display* sesuai dengan kategori atau tema tertentu agar mudah difahami, sehingga akhirnya dapat diambil pemahaman-pemahaman darinya sebagai bahan untuk membuat kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Indonesia

Globalisasi dan modernisasi memiliki dampak diberbagai sektor, salah satunya ialah pada sektor pariwisata. Pada sektor ini kemudahan akses lintas batas negara mengharuskan negara untuk bergerak meningkatkan hubungan negara dengan negara lain guna memberikan kemudahan bagi orang asing yang merupakan warganegara suatu negara untuk dapat berkunjung ke negara kita. Pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara dibutuhkan kewajiban untuk memiliki visa kunjungan agar dapat memasuki suatu wilayah tertentu, hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga bagi sebagian calon wisatawan yang akan berkunjung menjadikan ini suatu hambatan dan bagi negara daerah tujuan wisata merasakan bahwa biaya ini menghambat jumlah kunjungan wisatawan yang akan datang. Dengan demikian adanya kemajuan di era saat ini, muncul kebijakan baru terkait pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, dan hal ini juga telah diterapkan oleh negara lain terhadap Indonesia. Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah menggulirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan 19 manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Terdapat 169 negara penerima Bebas Visa Kunjungan. Dengan syara, yaitu memiliki Paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, serta memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima Bebas Visa Kunjungan bisa mendapatkan dengan alasan tujuan kunjungan sebagai berikut antara lain wisata, keluarga, social, seni dan budaya, tugas pemerintahan,

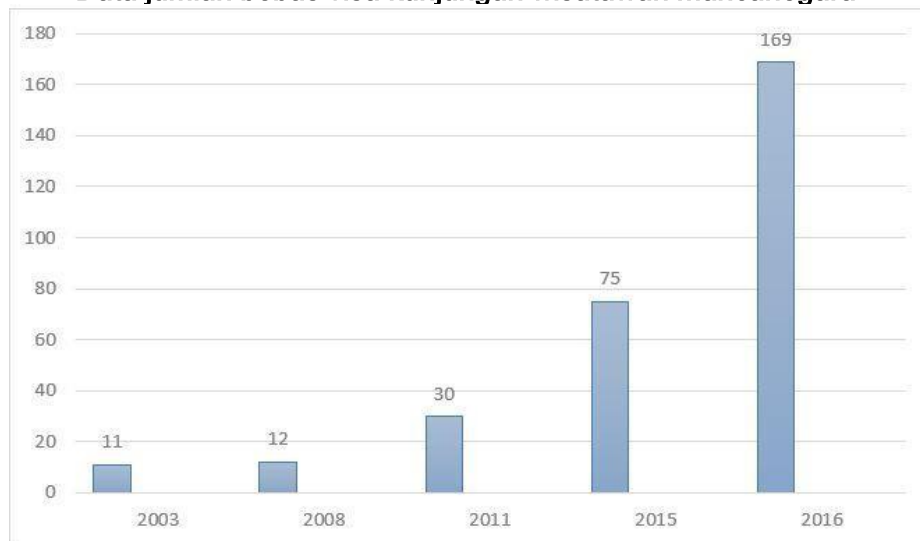
memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, serta meneruskan perjalanan ke negara lain.

B. Efektivitas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini ingin dilihat sebagai suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan angka kunjungan jumlah wisatawan yang masuk. Adapun peningkatan signifikan dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dari pemerintah, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan; dan
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Grafik 1
Data jumlah bebas visa kunjungan wisatawan mancanegara



Sumber : Kementerian Pariwisata (2019)

Dari data tersebut di atas, bahwa dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia atas dasar Keputusan dan Peraturan Presiden tersebut terlihat lonjakan lebih dari 1500% (seribu lima ratus persen) dari tahun 2003 terhadap negara yang diberi fasilitas bebas visa kunjungan yang hanya 11 negara menjadi 169 negara pada tahun 2016. Hal ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana, dalam satu sisi memang perlu untuk mendorong perkembangan ekonomi namun di sisi lain akses dari dibukanya lebar-lebar pintu masuk negara Indonesia ini betul-betul harus diperhatikan terkait masalah keamanan sekaligus kemanfaatannya.

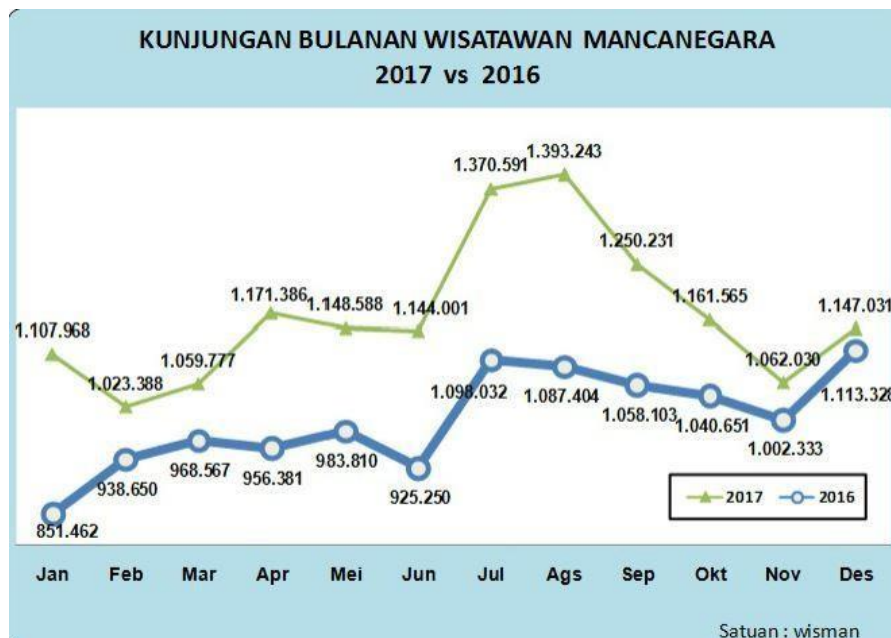
Dalam Peraturan Presiden tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, yaitu, pertama untuk meningkatkan hubungan

negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Selanjutnya pertimbangan kedua adalah untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Motivasi dari hal tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Tujuannya diarahkan untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa yang selama ini berjalan secara dominan. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa. Target dari kebijakan ini adalah adanya penambahan sekitar 1 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia yang senilai dengan kurang lebih 1,2 miliar USD (Arief Yahya, Menteri Pariwisata).

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, 10 Besar negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Amerika Serikat, Inggris dan Taiwan. Di sisi lain, memang terdapat peningkatan jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang ke Indonesia di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebagaimana yang terlihat dalam diagram berikut :

Grafik 2
Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara



Sumber : Kementerian Pariwisata (2019)

Hal tersebut tentu menunjukkan efektivitas terhadap target yang ingin dicapai dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut, namun melihat angka peningkatan dari sisi kuantitas saja tentu tidaklah cukup, ada kualitas wisatawan yang perlu dilihat, mengenai bagaimana daya

beli wisatawan ditempat tujuan wisata, bagaimana perilaku mereka dan bagaimana keamanan daerah wisata tersebut dapat tetap terjaga pasca diterapkannya kebijakan ini. Hal ini akan dapat kita lihat pada sub bab berikutnya mengenai dampak kebijakan bebas visa kunjungan.

C. Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Berbicara mengenai kualitas dan kuantitas wisatawan tentu dibutuhkan data untuk tidak hanya melihat meningkatnya angka jumlah kunjungan wisatawan, melainkan adakah data yang diterima pemerintah pusat terkait isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan atau paling tidak berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan negara terkait kualitas dan daya beli wisatawan, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk antaranya *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Dalam hal kemanfaatan kebijakannya juga masih perlu dievaluasi. Terkait dengan asas manfaat, kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus pengeboran oleh 5 (lima) pekerja warga negara Tiongkok di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, hal ini merupakan tamparan keras buat Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Alih-alih memberikan manfaat, 5 warga negara Tiongkok itu malah melakukan kegiatan ilegal, perkembangan terakhir 5 orang warga negara Tiongkok tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian (Media Indonesia).

Hal ini menjadi indikator aktual masih lemahnya pengawasan orang asing oleh pemerintah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling mendasar adalah kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melakukan pengawasan orang asing. Hal ini tentunya menjadi kendala utama dalam penegakan hukum keimigrasian, tidak hanya pada saat pemeriksaan, melainkan yang lebih penting lagi pada proses pengawasan. Terkait dengan asas resiprokal, asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemberian bebas visa akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa kepada Indonesia. Selain itu dari daftar nama negara yang diberikan bebas visa kunjungan tersebut, sebagian besar adalah negara yang bukan negara asal wisatawan mancanegara yang justru dominan datang ke Indonesia, tentunya hal ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah, karena apabila hanya mengutamakan kuantitas negara, maka potensi dampak negatif dari penerapan kebijakan bebas visa kunjungan ini akan lebih besar dari pada manfaat yang diberikan.

Namun yang perlu diingat bahwa 10 Besar negara penyumbang Wisatawan Mancanegara ke Indonesia adalah negara tetangga dan atau negara yang secara tradisional memang telah lama menjadi penyumbang terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu, khususnya dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, Sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan merupakan negara yang tidak menyumbang jumlah wisatawan yang signifikan ke Indonesia. Sehingga sesungguhnya penambahan negara-negara tersebut menjadi tidak relevan dengan tujuan untuk menggenjot jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Untuk itu perubahan strategi dibutuhkan dengan lebih memfokuskan energi dan sumber daya yang ada saat ini dengan melakukan diplomasi dan promosi pariwisata Indonesia ke negaranegara yang telah menyumbang atau berpotensi menyumbang jumlah wisatawan yang signifikan untuk datang ke Indonesia saja. Dalam kondisi saat ini, dapat muncul dugaan bahwa keamanan atau *security* dikorbankan untuk mendapatkan kemanfaatan atau *prosperity* (Merdeka, 2019). Berbagai hal tersebut di atas menyebabkan tidak tercapainya keseimbangan antara *prosperity approach* dengan *security approach*, untuk itu evaluasi terhadap Kebijakan Bebas Visa kunjungan ini patut dipertimbangkan, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara keamanan nasional (*security*) dan juga atas kemanfaatannya (*prosperity*) yang merupakan tujuan politik hukum keimigrasian Indonesia (Kemenkumham, 2019).

Pelemahan ekonomi Indonesia adalah realita yang kita harus hadapi bersama. Walaupun melemahnya ekonomi ini adalah akibat dari faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs Rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Di tengah merebaknya isu ekonomi yang sedang melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya serbuan ribuan tenaga kerja asing khususnya dari China. Kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah yang semakin tidak berdaya. Pekerja asal China ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerja sama dengan pihak dari negaranya tersebut. Tidak hanya itu, dapat berupa penyelundupan manusia, narkoba dan penanaman bibit sayuran berbakteri, serta pengibaran bendera China di sejumlah kawasan di Indonesia menjadi dampak lain yang dirasakan dan tentu meresahkan masyarakat sekitar.

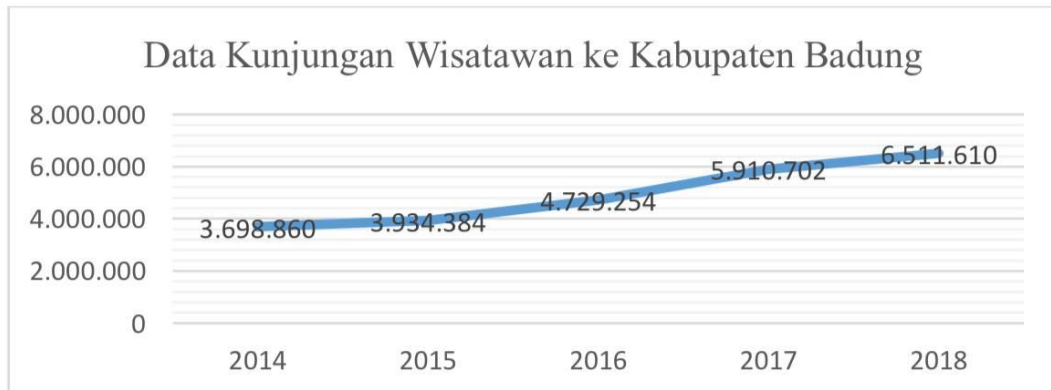
Merebaknya eksodus tenaga kerja asal China ke Indonesia sebenarnya berawal dari adanya kesepakatan investasi China di Indonesia melalui sistem *Turn key Project Management* yang disepakati dengan pemerintah Indonesia. *Turn key Project Management* adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China.

Turn key Project ini mengatur bahwa China akan berinvestasi di Indonesia tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. *Turn key Project* inilah yang kemudian ditantadatangani oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Belakangan diketahui bahwa *Turn key Project* ini merupakan konsep China dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar jiwa. Hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Sebab, sistem investasi satu paket ini, sudah sukses dijalankan China di Tibet (Dalai Lama) dan di Afrika, tepatnya Zimbabwe dan Angola..

D. Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Bali Melindungi atau Menghilangkan Kearifan Lokal

Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah menggulirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, termasuk di bidang keimigrasian. Dari data yang ada terlihat lonjakan lebih dari 1500% (seribu lima ratus persen) dari tahun 2003 terhadap negara yang diberi fasilitas bebas visa kunjungan yang hanya 11 negara menjadi 169 negara pada tahun 2016. Hal ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana, dalam satu sisi memang perlu untuk mendorong perkembangan ekonomi namun di sisi lain akses dari dibukanya lebar-lebar pintu masuk negara Indonesia ini betul-betul harus diperhatikan terkait masalah keamanan sekaligus kemanfaatannya.

Grafik 3.
Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung tahun 2014-2018



Sumber : Kementerian Pariwisata (2019)

Penulis kemudian mengambil sample di Badung sebagai tempat kunjungan wisatawan paling diminati di Bali, dimana kunjungan wisatawan memang betul telah meningkat tajam pasca adanya kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini masih menimbulkan atau paling tidak berpotensi menimbulkan permasalahan di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk diantaranya cyber crime, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Terkait dengan dampak yang dihadapi melalui kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus *illegal workers* dari Tiongkok tersebut, hingga kedatangan buruh impor juga mengancam terutama buruh kelas bawah yang semakin tidak berdaya. Pekerja asal China ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerja sama dengan pihak dari negaranya tersebut.

Di Bali kasus serupa masih banyak terjadi, dimana hal lainnya yaitu terdapat banyak warga negara Rusia yang kepadatan menjadi *Tour Guide* ilegal di Bali, mereka menjual jasa tersebut dengan tariff yang tentu tidak sama dengan travel agent yang resmi. Ada yang menjual dengan harga mahal, ada pula yang menjual dengan harga yang sangat rendah. Artinya, ada tiga hal dampaknya terhadap pariwisata di Bali, satu merusak tatanan niaga, kedua tidak menjadi sumber pendapatan pajak, ketiga kesempatan kerja diambil dan ini menjadi kekhawatiran terbesar akan pengambil alihan lahan pekerjaan masyarakat lokal oleh para *illegal workers* ini. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penyelundupan manusia, perdagangan narkoba. Kasus pedofilia yang dilakukan oleh warga negara asing juga sempat menjadi isu hangat dikalangan masyarakat Bali.

Berbicara mengenai kualitas wisatawan, hal terkait bagaimana para wisatawan ini begitu memanfaatkan paket ekonomis yang ditawarkan oleh *agent* tertentu sehingga ketika mereka datang ke Bali daya beli mereka tentu sangat rendah, ditambah lagi banyak dari paket-paket tour tersebut yang tidak menyentuh masyarakat lokal secara langsung, seperti tempat menginap yang sangat murah dan dikategorikan kurang layak untuk wisatawan dan mereka juga diarahkan untuk membeli produk negara asal mereka sendiri dimana barang baru akan mereka terima dinegara mereka nanti setelah mereka berlibur, sehingga tentu hal tersebut berkaitan dengan pajak yang tidak diterima oleh daerah wisata sebagai sumber pemasukan tersendiri. Menjadi kekhawatiran masyarakat daerah tujuan wisata yang dirasakan dan tentu meresahkan masyarakat lokal karena keuntungan yang diharapkan dengan mendatangkan jumlah wisatawan yang tinggi secara kuantitas tidak diimbangi dengan kualitasnya dan justru digunakan sebagai kegiatan melanggar hukum.

Hal ini menjadi indikator aktual masih lemahnya pengawasan orang asing oleh pemerintah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling mendasar adalah kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melakukan pengawasan orang asing. Hal ini tentunya menjadi kendala utama dalam penegakan hukum keimigrasian, tidak hanya pada saat pemeriksaan, melainkan yang lebih penting lagi pada proses pengawasan. Pada dasarnya bahwa pemberian bebas visa kunjungan akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa kepada Indonesia agar terjadi asas kebermanfaatannya yang sejalan. Namun dapat kita lihat hingga saat ini bahwa pelanggaran terjadi pada negara yang menyumbang banyak jumlah wisatawan ke Indonesia dan ada juga terjadi pada negara yang tidak banyak menyumbang. Dengan demikian diharapkan adanya perubahan strategi dibutuhkan dengan lebih memfokuskan energi dan sumber daya yang ada saat ini dengan melakukan diplomasi dan promosi pariwisata Indonesia dengan lebih baik lagi. Misal melakukan promosi yang lebih giat pada negara-negara yang telah memiliki *track record* baik terhadap Indonesia dan memberikan evaluasi atau informasi yang lebih signifikan terhadap negara-negara yang telah melakukan pelanggaran seperti pemberian informasi ketentuan tegas bebas visa kunjungan. Agar kekhawatiran masyarakat bahwa pemerintah memprioritaskan keuntungan dan mengesampingkan keamanan masyarakatnya dapat ditepis.

Tujuan politik hukum keimigrasian Indonesia yang harus dipertimbangkan ini menjadi dasar bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat harus menjadi hal yang paling diprioritaskan untuk tetap dijaga. Karena bagaimanapun juga nilai-nilai inilah yang menjadi daya Tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pemerintah didesak untuk mengevaluasi kebijakan mengenai bebas visa kunjungan ke Indonesia karena dianggap tidak efektif untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Tanah Air. Tujuan bebas visa adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Namun terjadinya kerugian pelanggaran seperti menyalahgunakan izin tinggal, *overstay* (kelebihan masa tinggal) hingga menjadi tenaga kerja ilegal ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Bali sehingga kekhawatiran masyarakat lokal tidak menjadi berkepanjangan serta kearifan lokal budaya yang kita miliki tidak akan tergerus melalui adanya permasalahan ini.

Nilai-nilai keramahan masyarakat setempat, keamanan yang selama ini telah kita miliki di Bali harus tetap kita lestarikan. Seperti beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres No.20/2018”). Adapun yang dimaksud Tenaga Kerja Asing di peraturan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Perpres 20/2018). Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”). Untuk mengawal proses pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No.10/2018”). Aturan terbaru ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu Permenaker No.16 Tahun 2015 dan Permenaker No.35 Tahun 2015. Aturan di Permenaker No.10/2008 dinilai lebih memudahkan pemberian izin kepada TKA. Hal ini tentu akan menjadi baik apabila lebih dikuatkan oleh pemerintah daerah sendiri yang menjadi pengawas secara langsung di daerah-daerah yang masih terjadinya banyak pelanggaran dan dalam hal ini sanksi akan menjadi lebih tegas kedepannya.

Kemudian hal lainnya yang juga telah banyak dilakukan pemerintah ialah sertifikasi tenaga kerja khususnya *tour guide* yang mana kegiatan sertifikasi tersebut merupakan kerja sama antara Bali Tourism Board dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sertifikasi tersebut juga dengan memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, wawasan, dan bahasa, sehingga kemampuan pemandu wisata yang sudah mendapat sertifikasi bisa bersaing dengan pemandu wisata baik didalam negeri hingga dengan pemandu wisata dari

luar negeri. Selain itu agar adanya evaluasi kembali mengenai sertifikasi atas pengetahuan budaya agar nilai-nilai yang dimiliki pada daerah-daerah pariwisata tidak mudah hilang dan ini akan berkaitan dengan skala prioritas pemanfaatan yang lebih baik kepada masyarakat lokal setempat terlebih dahulu.

Dengan demikian menjadi mudah melakukan identifikasi dan tindak lanjut untuk para *illegal workers* sebagai salah satu dampak yang dihadapi ketika terdapat aturan yang jelas, pengawasan yang tepat dan penegakan hukum yang semakin tegas. Mengingat bahwa tingkat jumlah (kuantitas) wisatawan yang terus didorong oleh pemerintah pusat harus juga didukung dengan kualitas wisatawan yang baik agar nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga dan tujuan peningkatan di sektor pariwisata mendukung peningkatan perekonomian negara harus secara langsung juga mendukung peningkatan perekonomian lokal masyarakat daerah tujuan wisata.

5. KESIMPULAN

Dengan adanya Kebijakan Bebas Kunjungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 yang secara berkala menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan khususnya Bali, maka dengan ini apa yang masih menjadi kekurangan dari kebijakan ini perlu kembali dikaji ulang agar dapat menemukan manfaat yang signifikan terhadap perekonomian serta menghindari dampak buruk atas pelanggaran hukum melalui kasus tenaga kerja ilegal yang dilakukan oleh wisatawan hingga perdagangan manusia maupun narkoba yang menjadi dampak buruk hingga isu sosial terkait kekhawatiran masyarakat lokal sendiri atas banyak munculnya pemandu wisata asing yang ilegal maupun legal yang dapat merusak kearifan lokal masyarakat setempat apabila pemandu wisata tersebut tidak memahami nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada setiap daerah-daerah tujuan wisata. Dengan demikian pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tandingan untuk menahan adanya letusan dampak negatif yang ada yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Tenaga Kerja Asing Perpres No,20/2018 sekaligus mengganti kebijakan sebelumnya yaitu Permenaker No.16 Tahun 2015 dan Permenaker No.35 Tahun 2015 juga pemberian sertifikasi terhadap pemandu wisata dan memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, wawasan, dan bahasa, sehingga kemampuan pemandu wisata yang sudah mendapat sertifikasi dan bisa bersaing dengan pemandu wisata dari luar negeri. Hal ini diharapkan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat lokal setempat akan sirna jika diiringi dengan pengawasan yang baik dan tepat agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran dan dampak buruk yang berarti atas munculnya kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini serta tetap dapat melindungi masyarakat lokal serta nilai-nilainya agar tentu dapat tetap dilestarikan sebagai satu daya Tarik khas Pulau Dewata.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin P. and Brodoss D. 1993. Asia's New Age Travelers. Asia Travel Trade.
Bapeda Bali. 1995. pada <http://www.bapeda-bali.go.id>
Bebas Visa Kunjungan, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik> diakses pada 15 Juli 2019
Bisnis Bali Online. 2003. pada <http://balipost.com>
Cakrawala Pendidikan Nomor 1, Tahun XII Yuni Sudarwati, 2015, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Info singkat Vol. VII, No. 06/II/p3DI, hlm. 13
Efektivitas penerapan kebijakan bebas visa kunjungan dikaitkan dengan selective policy keimigrasian Indonesia <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel> diakses pada tanggal 10 Juli 2019
Gunawan M.P. 1997. Tourism in Indonesia: Past, Present and Future. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung.

- Imigrasi kewalahan awasi orang asing,
<http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/44341>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019
- Jamieson, W. and Noble, A. 2000. A Manual for Community Tourism Destination Management. Canadian Universities Consortium Urban Environmental Management Project Training and Technology Transfer Program, Ca Lindberg, K. 1996. The Economic Impacts of Ecotourism. <http://ecotour.csu.edu.au/ecotour/mar1.htm>
- Kebijakan bebas visa gerus pendapatan, <https://www.merdeka.com/uang/menteri-yassona> diakses pada tanggal 10 Juli 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan .
- Pramono, Heru. 1993. Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Rilla, E. 1999. Bring the City & County Together. California Coast and Ocean. Vol. 15, No. 2. 10p.
- S. Pendit, Nyoman. 2003. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yoeti, A.Oka. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Offset Angkasa